



Judul : Pilot Susi Air Belum Ketemu Aparat Bisa Lacak Pake Alat Canggih
Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pilot Susi Air Belum Ketemu Aparat Bisa Lacak Pake Alat Canggih

PROSES pencarian terhadap pilot pesawat Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrstens, terus dilakukan oleh aparat keamanan. Pilot asal Selandia Baru itu diduga disandera Kelompok Kriminal Bersenjata - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KKB-TPNPB) sejak Selasa (7/2).

Anggota Komisi I DPR Sukamta mendorong agar aparat keamanan menggunakan alat deteksi yang pernah digunakan dalam melacak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Alat tersebut dipuji Menko Polhukam Mahfud MD karena bisa menemukan PMI di Arab Saudi melalui saluran YouTube.

“Sudah saatnya Menko Polhukam mendorong Polri gunakan alat serupa. Apalagi alat itu sudah teruji,” ujar Sukamta dalam keterangannya, kemarin.

Sukamta menyarankan, alangkah baiknya kecanggihannya alat digital milik Polri juga dapat digunakan untuk kepentingan keamanan di dalam negeri.

“Jika efektivitas alat tersebut sudah teruji, nggak ada salahnya digunakan untuk melacak KKB yang sandera pilot Susi Air,” kata dia.

Politikus PKS ini menekankan, Menko Polhukam selaku otoritas tertinggi dalam hal pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat, bisa membuat formulasi kebijakan terkait penggunaan alat canggih itu untuk digunakan dalam operasi penertiban KKB.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, TNI

tidak dapat bergerak sendiri dalam proses penyelamatan pilot Susi Air yang disandera KKB. Sebab, penanganan kelompok itu merupakan ranah aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian.

“TNI tak dapat menjalankan operasi melawan KKB, tanpa adanya perintah presiden. Tugasnya saat ini membantu kepolisian dalam mengatasi konflik di Papua,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, kemarin.

Hasanuddin menuturkan, dulu waktu masih disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) sesuai dengan aturan undang-undang sudah jelas menjadi tugas dan tanggung jawabnya TNI “Lalu oleh Pemerintah diganti menjadi KKB, jadi ini penegakan hukum oleh polisi,” ucapnya.

Karenanya, Hasanuddin menyarankan sebaiknya TNI memiliki dasar hukum yang kuat dalam menangani masalah konflik di Papua, khususnya KKB. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi masalah hukum ketika TNI melakukan operasi di Papua.

Salah satu payung hukum yang diusulkannya adalah Peraturan Presiden (Perpres) yang di dalamnya mengatur tentang operasi di Papua. TNI memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Dengan adanya Perpres, TNI dapat menentukan bentuk dan macam operasi yang akan dipakai di Papua. Bisa menggunakan operasi teritorial, operasi intelijen, atau operasi tempur. ■ TIF